

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT MELALUI PEMBINAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH PANGKALAN TNI AL TEGAL

Oleh:

Muhammad Taufik

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
muhammadtaufik@gmail.com,

Abstrak

Sejalan dengan tugas TNI Angkatan Laut yang telah diamanatkan Undang-undang, maka pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah salah satu implementasi pelaksanaan tugas tersebut. Suatu wilayah akan mempunyai kekuatan pertahanan yang baik apabila pemberdayaan wilayah tersebut dilakukan dengan partisipasi masyarakat setempat yang tinggi. Salah satu Pangkalan TNI AL di kawasan pantai utara Jawa Tengah adalah Lanal Tegal dengan masyarakat di tujuh Pemerintah Daerah tingkat II sebagian besar menggunakan laut sebagai sarana mencari penghidupan. Diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) menurunkan kepercayaan terhadap Pemerintah dan aparat penegak hukum di laut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan mulai bulan November 2015 – Juni 2016 dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dan FGD. Data divalidasi secara *cross check* dan dianalisa dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komandan Lanal Tegal mempunyai tugas pemberdayaan meliputi pembinaan kemampuan dan optimasi peran (1), sistem dan metode (2), keluarga besar TNI AL dan generasi muda serta masyarakat pesisir. Terdapat dua strategi dalam pelaksanaannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan meningkatkan peran Pangkalan TNI AL dengan Kerjasama berbagai pihak. Permasalahan antar nelayan maupun pemerintah menjadi kendala dalam pemberdayaan wilayah. Selain itu, keterbatasan kesadaran, pemahaman, kondisi dan jumlah personel belum mampu mengcover seluruh wilayah pesisir.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembinaan, Wilayah Laut, TNI AL

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan yaitu pada pasal 27 ayat 3 bahwa, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara dan sebagai alat pertahanan negara memiliki fungsi penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokoknya TNI membagi menjadi dua yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada pasal 7 UU RI nomor 34 tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu operasi militer selain perang TNI adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Sehingga salah satu tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Sejalan dengan tugas TNI Angkatan Laut yang telah diamanatkan Undang-undang, maka pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah salah satu implementasi pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan luas lautnya 3 kali luas daratannya, Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Namun demikian sebutan negara maritim tersebut belum tercermin dari aktivitas penduduknya, terutama sikap terhadap Pemerintah terkait kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang telah ditentukan. Sehingga menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim dengan segala potensi sumberdaya yang melimpah dan dapat diandalkan untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Suatu wilayah akan mempunyai kekuatan pertahanan yang baik apabila pemberdayaan wilayah tersebut dilakukan dengan partisipasi masyarakat setempat yang tinggi. Masyarakat nelayan merupakan bagian dari komponen cadangan dapat berperan serta dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut sesuai dengan kemampuan, peran dan pelibatan dalam sistem pertahanan negara. Kawasan pantai utara Jawa Tengah merupakan kawasan yang sangat potensial di sektor maritim. Seluruh wilayah pemerintah daerah tingkat II di sepanjang kawasan tersebut mempunyai sumber daya maritim yang dapat dikembangkan mendukung pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Salah satu Pangkalan TNI AL di kawasan pantai utara Jawa Tengah adalah Lanal Tegal yang

mempunyai wilayah kerja dengan tujuh Pemerintah Daerah Tingkat II, mulai dari Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang.

Masyarakat di tujuh Pemerintah Daerah tingkat II tersebut yang bermukim di kawasan pesisir tersebut sebagian besar menggunakan laut sebagai sarana mencari penghidupan. Mata pencaharian yang terdapat di kawasan ini antara lain sebagai nelayan, buruh pelabuhan, karyawan objek wisata bahari, pembuat kapal nelayan, karyawan di dok pembuatan dan perbaikan kapal, pedagang ikan, petani tambak yang sebagian besar adalah warga lokal. Namun jumlah sumber daya manusia di bidang maritim yang besar ini masih dikelola dengan manajemen tradisional sehingga belum dapat menghasilkan pendapatan yang memadai bagi masyarakat setempat. Seluruh kegiatan di bidang maritim di kawasan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masing-masing individu, sehingga belum dapat terlihat sinergitas dalam pola pemberdayaan antara masyarakat dengan Pemerintah.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia membuat masyarakat nelayan di wilayah Tegal dan sekitarnya merasa bahwa Pemerintah tidak memperhatikan keberadaan nelayan-nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap cantrang (menurut KKP cantrang = *trawls*), sehingga kepercayaan terhadap Pemerintah dan aparat penegak hukum di laut menjadi menurun. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan berkali-kali dilakukan yang dikoordinir oleh kelompok nelayan Tegal di Jakarta dan wilayah Pantai Utara Jawa Tengah sudah menjurus ke arah anarkhis.

Berdasarkan fenomena yang sudah diuraikan di atas, khususnya mengenai pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan melibatkan masyarakat nelayan di kawasan pantai utara Jawa Tengah yang dilakukan oleh Pangkalan TNI AL Tegal, penulis mencoba menuangkannya dalam tesis dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT MELALUI PEMBINAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH PANGKALAN TNI AL TEGAL"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2010) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada

umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data.

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan mulai dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. dengan Sumber dan jenis data primer sertasekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*), FGD dengan narasumber dan tokoh-tokoh masyarakat pesisir dan catatan observasi di kawasan pesisir dalam wilayah kerja Lanal Tegal. Data diolah menggunakan pengujian keabsahan dan keterandalan data dengan melaksanakan validasi dengan cara *cross check* dengan para nara sumber yang memiliki keahlian di bidangnya, para pelaku dan pihak-pihak yang terkait sebagai *key persons* serta triangulasi. Data diolah sesuai dengan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) dengan melakukan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada proses analisis, penulis dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menguraikan persoalan-persoalan tersebut berdasarkan data dan pisau analisis yang digunakan. Analisis data ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal secara terperinci berdasarkan pada konsep dan teori yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah

Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang terletak 109°08' sampai 109°10' garis Bujur Timur dan 6°50' sampai 6°53' garis Lintang Selatan. Relief daerahnya merupakan dataran rendah dengan tinggi dari permukaan laut ± 3 meter, terdapat aliran sungai dan struktur tanahnya adalah jenis tanah berpasir dan tanah liat. Berbatasan di sebelah timur adalah Kabupaten Pemalang, sebelah selatan Kabupaten Tegal, sebelah barat Kabupaten Brebes dan sebelah utara adalah Laut Jawa. Luas wilayah Kota Tegal adalah 39,68 km². Secara administrasi wilayah dibagi empat Kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana dengan 27 Kelurahan. Seperti pada umumnya wilayah pesisir pantai di Indonesia pada umumnya dan Pulau Jawa khususnya, iklim di Kota Tegal adalah tropis dan bersuhu udara relatif panas. Dengan kondisi geografi dan iklim yang baik ini, menjadikan Kota Tegal berkembang dari segi perekonomian. Sebagai kota pelabuhan, terdapat tiga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu TPI Tegal Sari, TPI Pelabuhan dan TPI Muara Reja. Produksi dan nilai produksi sub sektor perikanan laut masih cukup besar, meskipun dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung.

Tiga Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kota Tegal, hanya ada satu TPI yang memberikan pendapatan pajak dari hasil lelang ikan, yaitu TPI Pelabuhan. Sementara yang dua TPI lainnya yaitu TPI Tegal Sari dan TPI Muara Reja tidak ada pendapatan pajak daerah dari hasil lelang ikan

dikarenakan dua tempat tersebut hasil ikan dari nelayan tidak dilakukan lelang, namun langsung dibeli atau disetorkan kepada pembeli ikan atau yang sering disebut di wilayah ini sebagai bakul ikan. Pemetaan monografi menunjukkan bahwa mayoritas nelayan bertempat tinggal di kelurahan Tegal Sari.

Wilayah pesisir kelurahan ini merupakan kawasan yang tandus dan gersang. Ini disebabkan karena pembangunan industri pengolahan ikan yang menjamur di sepanjang pesisir tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Masyarakat pesisir di Kelurahan ini sudah diberikan sosialisasi tentang kelestarian lingkungan baik oleh Pemerintah Kota dan Pangkalan TNI AL Tegal. Beberapa program tentang pembersihan Pelabuhan dan penghijauan bersama yang dilaksanakan rutin setiap bulannya belum dapat memberikan hasil optimal. Kesadaran untuk menjaga kebersihan dari para nelayan dan pelaku usaha seperti pedagang ikan, buruh pelabuhan, buruh jasa angkutan hasil ikan, serta masyarakat Kelurahan secara umum masih perlu ditingkatkan. Sehingga tampak dengan jelas kondisi yang kotor di Pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan dan wilayah pemukiman nelayan.

Pola pembinaan dan pemanfaatan organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dapat dilihat pada gambar 1. perlu adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim untuk dapat mendukung pertahanan laut di wilayah kawasan pantai utara Jawa Tengah. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas kelautan dan perikanan, Kantor kesbangpolinmas, Pangkalan TNI AL Tegal dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberikan solusi permasalahan terkait pelarangan alat tangkap ikan bagi kapal ikan 30 GT dan perkelahian antar nelayan karena memeperebutkan area tangkap perlu dilakukan secara intensif dan konsisten. Langkah-langkah tersebut dapat berupa sosialisasi peraturan perundangan dengan menggunakan metode penyampaian yang praktis dan aplikatif. Misalnya di dalam penjelasan pasal-pasal di perundangan tersebut disampaikan dengan contoh kasus yang ada.



Gambar 2. Diagram Model Pembinaan Dan Pemanfaatan Dalam Mendukung Pertahanan Wilayah Laut

Sumber : Hasil Olahan Peneliti tahun 2015

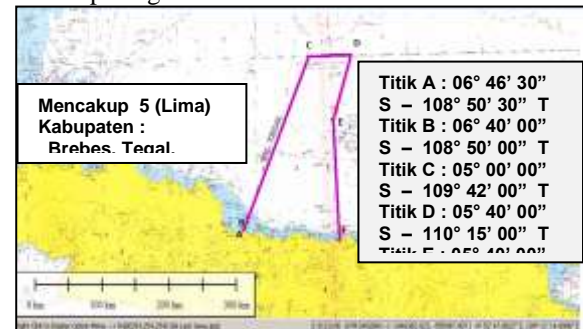
Pada dasarnya tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut sudah melekat pada Pangkalan TNI Angkatan Laut. Sehingga seluruh personil Lanal

sudah semestinya wajib melaksanakan salah satu tugas TNI AL tersebut. Namun dalam kenyataannya, hanya anggota staf Potmar dan Posal jajaran Lanal Tegal yang melaksanakan pemberdayaan wilayah pesisir. Pembekalan kepada seluruh personil Lanal Tegal terkait tugas dawilhanla ini mutlak diperlukan karena ujung tombak pelaksanaan tugas ini salah satunya adalah peran dari personil TNI AL yang langsung berhadapan dengan masyarakat pesisir. Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan pantai utara Jawa Tengah seharusnya sudah mulai diarahkan kepada penyiapan masyarakat pesisir ini sebelum dapat dijadikan komponen cadangan maupun komponen pendukung pertahanan laut. Sehingga personil Lanal ini dituntut mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir di wilayah kerjanya terkait bela negara yang dapat diimplementasikan dengan cara menaati aturan perundangan pemerintah terutama dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pembinaan masyarakat pesisir dan potensi sumber daya maritim yang ada di kawasan pantai utara Pulau Jawa adalah salah satu tugas dan tanggung jawab Komandan Lanal Tegal dalam batas wilayah kerjanya. Dalam penulisan tesis ini, Lanal Tegal adalah salah satu dari objek penelitian. Komandan Lanal Tegal mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut berdasarkan rencana dan program dari Lantamal V/Surabaya, meliputi :

1. Pembinaan kemampuan dan optimalisasi peran Posal dalam membina daerah pesisir guna mendukung kekuatan TNI AL.
2. Pembinaan sistem dan metode dalam rangka membantu pembinaan sistem dan metode TNI AL.
3. Pembinaan keluarga besar TNI AL di lingkungan Lanal Tegal dalam rangka membantu pembinaan keluarga besar TNI AL.
4. Pembinaan kepada generasi muda, masyarakat pesisir dan Pramuka Saka Bahari dalam rangka cinta bahari dan NKRI melalui PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara) dan PKBN (Pendidikan Kesadaran Bela Negara).

Adapun wilayah kerja Lanal Tegal dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Lanal Tegal
Sumber : Staf Operasi Lantamal V Surabaya

Kondisi seperti yang telah disampaikan di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut masih perlu dioptimalkan, dan untuk meningkatkan kualitas personil dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah menugaskan perwira staf bidang potensi maritim untuk mengikuti kursus dan pelatihan di Dispotmar TNI AL dengan tujuan dapat memahami akan tugas pokok dan fungsinya dalam dawilhanla sekaligus dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh personel Lanal Tegal agar mind set seluruh personel Lanal mempunyai pemahaman tugas dawilhanla ini dengan baik.

Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah diperlukan rumusan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan disertai dengan upaya-upaya untuk mengaplikasikan strategi yang telah ditetapkan serta menjabarkan kebijakan tersebut ke dalam beberapa strategi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga dapat dihasilkan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah yang dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

1. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka dapat ditentukan beberapa strategi untuk dapat mewujudkan pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan laut yaitu :

- a. Strategi - 1 : Meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan pengetahuan, meningkatkan pendidikan untuk menaikkan kemampuan kerja, serta pengembangan potensi sumber daya manusia bidang maritim yang ada dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
- b. Strategi - 2 : Meningkatkan peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal melalui kerja sama Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal dengan pemerintah Provinsi, pemerintah Kota/Kabupaten dan instansi kemaritiman lainnya, implementasi program kerja yang telah disusun guna peningkatan sumber daya manusia bidang maritim, pendayagunaan potensi maritim, meningkatkan pendidikan dan pelatihan personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal serta melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

2. Upaya

Di dalam implementasi strategi yang telah disusun, maka diperlukan upaya-upaya konkrit

pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir di wilayah kerja Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal untuk pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim dalam mendukung pertahanan negara di laut, seperti :

a. Upaya mendukung strategi – 1 :

Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal perlu melakukan peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat pesisir di wilayah kerjanya melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan sosialisasi dan pembelajaran tentang aturan hukum bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir di kawasan pantai utara Jawa Tengah agar dapat lebih memahami dan menaati ketentuan yang berlaku sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan dapat lebih baik.
- 2) Meningkatkan dukungan fasilitas dan kualitas pendidikan di daerah pesisir agar mengurangi anak putus sekolah dan pengangguran sehingga generasi muda dapat membangun daerah nya dengan menerapkan ilmu yang didapatkannya demi kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pembangunan nasional.
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja secara baik dan optimal dengan memberikan pemahaman akan pentingnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif di kawasan pesisir panturan
- 4) Mempelopori peningkatan kehidupan masyarakat pesisir dengan memberikan penyuluhan dan pembekalan tentang aspek maritim, dengan cara mendorong usaha peningkatan hasil tangkapan nelayan melalui pelatihan penggunaan teknologi dalam proses menangkap ikan, mendorong industri pengolahan ikan pada pusat pengumpulan untuk menampung hasil tangkapan dan budi daya ikan, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budi daya ikan, udang, terumbu karang dan teknologi eksplorasi dan eksploitasi dasar laut secara efektif, efisien dan ramah lingkungan.
- 5) Mendorong pengembangan industri rumah tangga dengan menggunakan hasil laut dengan bekerja sama dengan koperasi.

b. Upaya untuk mendukung strategi – 2:

Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal di kawasan pantai utara Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut bergantung kepada personel yang dimilikinya. Dan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas tersebut antara lain :

- 1) Memberikan pembekalan kepada seluruh personel Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal dalam

pelaksanaan tugas dawilhanla melalui kursus dan pelatihan yang telah diprogramkan oleh Dispotmar TNI AL maupun oleh perwira Lanal yang telah mengikuti kursus dan pelatihan tentang dawilhanla.

- 2) Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan masyarakat pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal yang dimulai dengan mendorong kelompok-kelompok nelayan terus berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di kalangan nelayan.
- 3) Melaksanakan inventarisasi kemampuan dan potensi kawasan pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal dalam rangka penyiapan daerah untuk mendukung pertahanan negara, khususnya meningkatkan pemahaman tentang bela negara yang dapat ditunjukkan dengan ketaatan mengikuti peraturan perundangan terutama yang menyangkut sektor kelautan dan perikanan.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas kegiatan masyarakat pesisir baik kepada nelayan di laut, pelabuhan maupun kegiatan aksi unjuk rasa yang sering dilakukan.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan sosialisasi kesadaran bela negara kepada para nelayan yang dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan wadah PNKT (Paguyuban Nelayan Kota Tegal) yang merupakan binaan Lanal Tegal.
- 6) Melaksanakan penyuluhan hukum dan bela negara serta sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir.
- 7) Melaksanakan program kegiatan bhakti sosial di kawasan pesisir di wilayah kerja Lanal Tegal secara terencana.
- 8) Memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir tentang kepedulian terhadap lingkungan laut dan pesisir melalui pemahaman fungsi ekosistem pantai dan keanekaragaman hayati sehingga fungsinya sebagai penghalang gelombang, habitat dan tempat.
- 9) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat pesisir dengan mendirikan rumah baca dan kelompok belajar.

B. Kendala Dalam Pemberdayaan Wilayah

Masyarakat pesisir di Kota Tegal adalah masyarakat pesisir yang lokasinya dekat di perkotaan. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat nelayan setempat. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya membuat komunikasi antar nelayan di kawasan pantai utara Jawa Tengah terjalin dengan cepat. Dengan canggihnya sistem komunikasi yang ada, maka kemudahan dan kecepatan dalam berkomunikasi

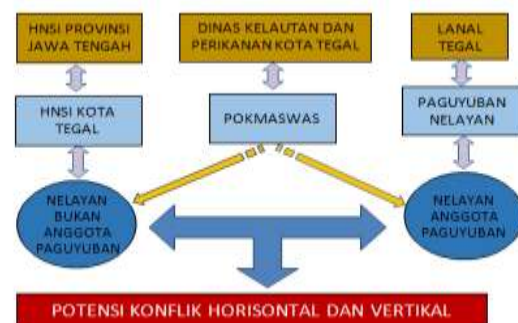
dapat memupuk solidaritas antar nelayan dalam memperjuangkan mata pencahariannya sebagai nelayan yang sudah lama terbentuk semakin kuat. Namun demikian, masih ada beberapa kelompok nelayan yang masih mempunyai permasalahan antar nelayan maupun dengan pemerintah. Kerawanan wilayah Tegal dapat dipetakan pada gambar 3.



Gambar 3. Peta Kerawanan Wilayah Lanal Tegal

Sumber : Staf Intelijen Lanal Tegal.2015

HNSI Kota Tegal merupakan cabang dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai keanggotaan rukun-rukun nelayan di pesisir Kota Tegal. Rukun-rukun nelayan di pesisir Kota Tegal ini adalah kelompok-kelompok nelayan yang terbentuk berdasarkan kesamaan alat tangkap yang digunakan, seperti rukun nelayan cantrang, rukun nelayan purseine, rukun nelayan dogolan yang berjumlah 12 rukun nelayan tersebar di empat kecamatan dan mempunyai anggota 12.934 orang yang terdiri atas pemilik kapal ikan, ABK kapal ikan, pedagang/bakul ikan pelabuhan dan buruh angkut hasil ikan di Pelabuhan ikan. Interaksi organisasi kemasyarakatan di Kota Tegal pada gambar 4.



Gambar 4. Diagram Interaksi Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. Tahun 2015

Permasalahan yang terkait perkelahian di antara nelayan lokal dapat diminimalkan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah melalui dinas perikanan dan kelautan, Camat dan Kepala Desa untuk memberikan penjelasan terkait area tangkap. Lanal Tegal, Polair dapat mendukung dengan menggiatkan patroli keamanan laut terbatas untuk sebagai pengawas kegiatan nelayan di laut. Selain itu sinergitas antar pemerintah, aparat penegak hukum di laut dan organisasi kemasyarakatan harus

terjalin dengan baik, mengingat perkelahian antar nelayan ini disebabkan perbedaan alat tangkap yang digunakan pada area tangkap yang sama yang semuanya terbentuk kelompok-kelompok nelayan yang menginduk pada organisasi kemasyarakatan yang tidak sama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sering ditemukan kendala dalam hal pengawasan dan pemantauan kegiatan para nelayan terutama pada wilayah dibawah 12 mil laut dari pantai. Kendala ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Lanal Tegal terutama kapal-kapal patroli. Patroli laut terbatas yang dilakukan ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi aktifitas nelayan selama berada di laut khususnya dalam hal penggunaan alat tangkap dan perkelahian antar nelayan. Sosialisasi penggunaan alat tangkap dan peraturan perundangan yang mengatur tentang usaha perikanan telah disampaikan secara intensif kepada para nelayan melalui wadah PNKT namun, masih dalam kenyataannya masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan bahkan ini menjadi pemicu perkelahian antar nelayan ketika di laut.

Terkait keberadaan personel Lanal Tegal, menurut keterangan Ketua Pokmaswas Tegal Sari, Saudara Khaliri yang pada saat dilaksanakan penelitian ini berada di pelabuhan mengatakan bahwa terkadang kapal yang akan berangkat mencari ikan di laut sebelumnya memantau posisi kapal patroli Angkatan laut yaitu keberadaan dua KAL di bawah operasional Lanal Tegal. Karena masih ada beberapa kali oknum pengawak kapal patroli Angkatan Laut ini meminta kontribusi baik berupa hasil ikan atau uang dari kapal ikan yang diperiksa. Demikian pula saat sudah berada area penangkapan ikan di laut, masih terjadi oknum aparat penegak hukum yang menerima gratifikasi berupa uang untuk meloloskan kapal-kapal ikan yang diperiksa. Sehingga para nelayan terkesan menghindari dari pemeriksaan oleh kapal patroli penegak hukum. Para nelayan melakukan tindakan tersebut karena merasa bahwa kapal ikan mereka belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan sumber manusia bidang maritim di kawasan sebagian kawasan Pantai Utara Jawa Tengah diawali dengan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir oleh Pangkalan TNI AL Tegal.
2. Organisasi kemasyarakatan yaitu HNSI (himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), PNKT (Peguyuban Nelayan Kota Tegal) yang ada di wilayah kerja Lanal Tegal pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama-sama ingin memajukan kesejahteraan masyarakat

nelayan, namun dalam praktek di lapangan sering terjadi perbedaan kepentingan yang dapat menyebabkan perpecahan antar kelompok nelayan.

3. Pangkalan TNI AL Tegal telah melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut dengan mendorong terbentuknya paguyuban nelayan sebagai salah satu solusi pemecahan masalah masyarakat yang kemudian dapat disiapkan sebelum menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Laut.
4. Pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut oleh personel Lanal Tegal belum optimal karena keterbatasan kesadaran dan pemahaman tugas, jumlah personel yang ada belum mampu mengcover seluruh wilayah pesisirnya dengan rata-rata menjelang Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan sebagian personel lainnya kondisi kesehatan fisiknya yang tidak memungkinkan untuk beraktifitas secara optimal (perawatan karena sakit dan cacat).
5. Kerjasama Pemerintah dengan Pangkalan TNI AL Tegal sudah berjalan dengan cukup baik.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi praktis dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah dalam wilayah kerja Lanal Tegal masih dimulai dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal ini masyarakat nelayan sebelum disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara di laut.
2. Dihadapkan pada berbagai permasalahan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah dapat dirumuskan kebijakan "Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia bidang maritim di kawasan pantai utara Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir dan peningkatan peran Pangkalan TNI AL Tegal dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut"

5. DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Manajemen. CV. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1
- UU RI nomor 34 tahun 2004 pasal 7